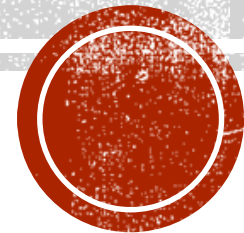


REFLEKSI REFORMA AGRARIA DALAM PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA

Usep Setiawan (TAU Kantor Staf Presiden RI)



Webinar WRI, 10 Agustus 2023

REFLEKSI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

- RA sudah menjadi komitmen politik Presiden dan Wapres sejak Nawacita 2014
- Agenda RA masuk ke dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024
- Program dan kegiatan RA menjadi bagian dari RKP sejak 2017 sampai 2024
- Telah terbit Perpres 86/2018 tentang RA
- Sedang difinalisasi penyempurnaan Perpres Percepatan Pelaksanaan RA (2023)
- Telah disusun dan dilaksanakan RKA KL sejak 2017, untuk:
 - Penguatan kebijakan dan penyelesaian konflik agraria
 - Redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah
 - Legalisasi aset tanah rakyat
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - Pengembangan kelembagaan pelaksanaan RA di pusat, provinsi, dan kab/kota



KEBUTUHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN RA

- **KEBIJAKAN:**

- Anti setoralisme → Presiden sudah meminta: Hentikan sektoralisme!
- Lakukan sinergi lintas K/L/D dan kolaborasi dengan berbagai pihak
- Libatkan komunitas masyarakat subyek RA dan para pendampingnya

- **PERATURAN:**

- Perkuat substansi dan strategi Perpres RA
- Lakukan sosialisasi dan konsolidasi birokrasi
- Laksanakan konsultasi dan kolaborasi dengan rakyat
- Konsistensi melaksanakan RA di lapangan



DEKLARASI WAKATOBI (JUNI 2022)

- Deklarasi Wakatobi yang dihasilkan dari pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi RA.
- Dukungan dari semua pihak amat dibutuhkan karena reforma agraria tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, tetapi kerja kolaboratif lintas instansi.
- Puncak pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 menegaskan bahwa reforma agraria adalah kerja kolaborasi berbagai pihak.
- Dukungan mesti diberikan oleh K/L/D karena Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemen ATR/BPN sebagai *leading sector* tidak bisa bekerja sendirian.

---Sumber: Kompas, 10 Juni 2022.



REFLEKSI RA DARI WAKATOBI KE KARIMUN

- Ketegasan pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan RA mutlak diperlukan agar seluruh jajaran birokrasi memahami bahwa agenda RA itu sungguh-sungguh menjadi agenda nasional yang harus dilaksanakan;
- Kesepahaman bersama lintas K/L/D bahwa RA itu merupakan agenda bangsa yang menjadi tanggungjawab seluruh K/L/D dalam melaksanakannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, masih harus diperkuat;
- Sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran lintas K/L/D masih perlu dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam RA bisa dilakukan secara lebih terintegrasi dan komprehensif;
- Konsistensi melaksanakan Perpres Percepatan Pelaksanaan RA → Kerja bersama KL dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kab/Kota) masih harus ditingkatkan agar ada keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan RA di daerah;
- Kolaborasi pelaksanaan RA dengan organisasi rakyat di lapangan dan organisasi masyarakat sipil pendampingnya masih harus digencarkan agar pelaksanaan RA bisa lebih partisipatif, emansipatif, dan demokratis.



USEP SETIAWAN

- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
- HP: 081317926383
- Email: usep.setiawan@ksp.go.id

